

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang berarti negara. Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris “*policie*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. *Policy* diartikan juga hal-hal mengenai kebijakan pemerintah, atau sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik.

Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Rohman, 2016 : 5). Pengertian kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam hal ini, kebijakan publik merupakan kebijakan yang diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan lain sebagainya yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat juga ditetapkan dan disahkan oleh lembaga yang berwenang yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Salah satu produk kebijakan publik yang merupakan komoditas politik yang menyangkut kepentingan publik ialah peraturan perundang-undangan (Ramdhani & Ramdhani, 2017:3).

Dari penjelasan berikut peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik ialah suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh semua golongan masyarakat tanpa kecuali yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat. Hill and Hupe memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan (Hill M, 2016 : 41). Implementasi merupakan tahapan dalam proses kebijakan publik. Implementasi diterapkan setelah ditetapkannya kebijakan dan disampaikan kepada masyarakat untuk mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Implementasi kebijakan pada intinya adalah suatu cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dan latar belakang pembentukannya memiliki dua langkah yang ada, yaitu dalam bentuk program yang diimplementasikan secara langsung atau melalui turunan dari kebijakan publik

tersebut. Implementasi kebijakan dapat jelas dilihat melalui program, proyek dan kegiatan. Kebijakan diturunkan menjadi program kemudian proyek dan terakhir diturunkan melalui kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat (Agindawati, 2019 : 104).

Definisi implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut George Edward implementasi kebijakan memiliki prioritas rendah diantara sebagian besar pejabat terpilih. Anggota kongres dan legislator negara yang bertanggung jawab untuk mengawasi birokrasi seringkali tidak memiliki keahlian dalam administrasi untuk melakukannya secara efektif. Studi implementasi kebijakan berbeda dari apa yang umumnya disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah alat yang berkembang pesat dan berharga bagi para membuat kebijakan.

Berdasarkan pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya melalui bentuk program

2.1.3 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan terdapat tiga unsur mutlak yang harus ada, yaitu:

1. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana merupakan implementor kebijakan seperti yang diterangkan menurut Dimock & Dimock bahwa unsur pelaksana sebagai berikut; Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan

kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

2. Program Yang Dilaksanakan

Kebijakan publik tidak akan memiliki arti penting apabila tidak ada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan dalam program yang dilaksanakan, seperti yang diterangkan suatu program dapat didefinisikan sebagai rencana komprehensif yang mencakup penggunaan masa depan sumber daya yang berbeda dalam pola terintegrasi dan membentuk urutan tindakan yang diperlukan dan jadwal waktu untuk setiap dalam rangka mencapai tujuan yang dinyatakan. *Make up* dari sebuah program dapat mencakup tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran. Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Merancang bangun program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu
- b. Melaksanakan program dengan memanfaatkan personalia, dana serta sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sasaran-sasaran pengawasan yang tepat guna serta evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan.

3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi

perilakunya oleh kebijakan. Berdasarkan penjelasan berikut peneliti dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur implementasi kebijakan itu ada tiga yaitu unsur pelaksana, program yang dilaksanakan dan kelompok sasaran.

2.1.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Studi implementasi memiliki dua pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan implementasi, Menurut Sabatier (1986: 21-48) dalam buku Kertati dua pendekatan itu ialah pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Pada pendekatan *top-down*, studi implementasi menggunakan logika berpikir dari atas, selanjutnya melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Tujuan utama dalam pendekatan *top-down* ialah mengidentifikasi penyebab permasalahan implementasi kebijakan atau kegagalan untuk mencapai tujuan kebijakan. Contoh model implementasi yang menggunakan pendekatan *top-down* adalah Mazmanian dan Sabatier, Van Meter dan Van Horn, Edward III dan Grindle.

Adapun pendekatan implementasi berikutnya ialahh pendekatan *bottom-up*, pendekatan ini bermanfaat untuk mengetahui jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level dan memetakan ekonomi politik dari para aktor tersebut. Dalam pendekatan ini memiliki keuntungan yaitu terjadinya interaksi intensif antara birokrat sebagai pengambil keputusan pada level atas dengan para aktor di bawah dan kelompok sasaran. Berdasarkan penjelasan pada pendekatan implementasi kebijakan publik berikut penjelasan mengenai model implementasi kebijakan publik, antara lain:

1. Model Van Meter Dan Van Horn

Model ini merupakan model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model Ini menegaskan bahwa Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik (Kadji, 2015 : 54). Menurut model ini ada beberapa variabel yang mempengaruhi proses kebijakan publik, antara lain:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b. Karakteristik dan agen pelaksana atau implementor
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- d. Kecenderungan dari pelaksana atau implementor (Kadji, 2015 : 54).

Van Meter dan Van Horn mengkategorikan kebijakan dengan cara melihat tantangan dalam implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn juga memiliki sudut pandang teoritis mereka dimulai dengan strategi dengan kesederhanaan relatif (Hilll M, 2016 : 51).

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Kontribusi berikutnya dari perspektid *top-down* berasal dari dua sarjana Amerika, Paul Sabatier dan Daniel Mazmaniam. Dalam Mustari (2015 : 152-153) menurut Mazmanian dan Sabatier suatu kebijakan selalu berkaitan dengan tiga variabel, yakni:

- a. Variabel masalah yang terdiri atas ketersediaan teknologi dan teori teknis, keragaman perilaku, kelompok sasaran, sifat populasi derajat perubahan perilaku yang diharapkan

- b. Variabel daya dukung peraturan, yang terdiri atas kejelasan dan konsistensi tujuan, ketepatan alokasi sumber daya, keterpaduan hirarki dalam dan diantara lembaga pelaksana, aturan-aturan keputusan dari lembaga pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana dan akses formal pihak luar
- c. Variabel non peraturan yang terdiri atas kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok, dukungan dari pejabat atasan, komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

Model Mazmanian dan Paul A Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yakni:

- a. Variabel *independen*; indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan yang dikehendaki mempengaruhi mudah tidaknya masalah yang dikendalikan.
- b. Variabel *intervening*; kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsisten tujuan, ketepatan alokasi sumber daya, aturan dan lembaga pelaksana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana serta dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.
- c. Variabel *dependen*; dalam variabel ini memiliki lima tahapan dalam proses implementasi yaitu pemahaman dari lembaga pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerima atas hasil nyata dan revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut (Kadji, 2015 : 57).

3. Model Hugwood & Gun

Model implementasi ini dari dua penulis asal Inggris Brian Hugwood dan Lewis Gun. Pendekatan pragmatis itu juga tercermin dalam buku mereka dimana kita melihat ide-ide ini dikembangkan. Hugwood dan Gun menawarkan proposisi yang dapat dibaca sebagai rekomendasi kepada pembuat kebijakan seperti Sabatier dan Mazmanian. Menurut model ini dalam buku Hill (2016 : 50) bahwa pembuat kebijakan harus memastikan:

- a. Keadaan di luar lembaga pelaksana tidak memaksakan kendala
- b. Memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk program
- c. Memastikan sumber daya yang tersedia disetiap tahapan dalam proses implementasi
- d. Kebijakan ditetapkan berdasarkan teori yang valid
- e. Adanya hubungan antara sebab dan akibat
- f. Lembaga pelaksana tidak perlu bergantung pada lembaga lain untuk sukses atau jika harus melibatkan lembaga lain cukup memiliki hubungan sesuai dengan kepentingan
- g. Memiliki pemahaman yang lengkap dan kesepakatan tujuan yang ingin dicapai dan bertahan selama proses implementasi
- h. Menentukan tugas-tugas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
- i. Adanya komunikasi yang baik disetiap elemen
- j. Mereka yang berwenang dapat menuntut dan memperoleh kepatuhan yang baik.

Model Hugwood dan Gun didasarkan pada konsepsi manajemen strategi yang mengarah pada praktek manajemen yang sistematis hanya saja kelemahannya konsep ini tidak secara tegas mana yang bersifat politis, strategis dan teknis (Kadji, 2015 : 58).

4. Model Grindle

Model keempat adalah model Merilee S. Grindle tercantum dalam buku Kadji (2015 : 59) yang menegaskan bahwa; “Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi”. Isi kebijakan yang dimaksud adalah:

- a. *Interest affected* merupakan kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. *Type of benefit*, jenis manfaat yang dihasilkan
- c. *Extent of change envisioned*, derajat perubahan yang diinginkan
- d. *Site of decision making*, kedudukan pembuat kebijakan
- e. *Program implementors*, pelaksana program
- f. *Resources committed*, sumber daya yang dikerahkan (Kadji, 2015 : 59).

Sementara isi konteks implementasinya adalah:

- a. *Power*, kekuasaan
- b. *Interest strategies of actors involved*, kepentingan strategi aktor yang terlibat
- c. *Institution and regime characteristic*, karakteristik lembaga dan penguasa

- d. *Compliance and responsiveness*, kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (Kadji, 2015 : 59).

5. Model George Edward III

Dalam model George Edward III mempelajari apa prasyarat dan hambatan dalam menjalankan implementasi kebijakan yang sukses, disini terdapat empat faktor penting atau variabel dalam melaksanakan kebijakan publik; komunikasi, sumber daya disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan. Berikut penjelasan mengenai empat variabel tersebut, sebagai berikut:

a. Komunikasi

Menurut Edward III menegaskan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk melaksanakan implementasi kebijakan ini harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada orang-orang yang menjadi pelaksana kebijakan ini. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak spesifik maka kemungkinan besar akan membuat orang-orang salah paham dan kebingungan dalam memahami deskripsi tugas yang harus dilakukannya. Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut. Maka dari itu faktor komunikasi memegang peran penting agar implementor kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan.

b. Sumber Daya

Menurut Edward III sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik. Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut (kapasitas dan motivasi). Hal ini dapat menjelaskan bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif.

c. Disposisi atau Sikap

Menurut Edward III Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi, tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Disisi lain bahwa dalam implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur oprasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Para implementor kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat dalam proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani.

Menurut Edward III dari empat variabel terdapat beberapa indikator di dalamnya yang menunjang keberhasilan suatu implementasi diantaranya ialah:

- 1) Komunikasi dengan tiga indikator diantaranya transmisi (penyaluran komunikasi yang baik), kejelasan dalam memberikan informasi kepada para pelaksana kebijakan dan komitmen (informasi yang disampaikan konsisten)
- 2) Sumberdaya dengan dua indikator diantaranya sumber daya manusia (staf) dan sumber daya non manusia (sarana dan prasarana, anggaran)

- 3) Disposisi dengan indikator karakteristik pelaksana, efek disposisi dan insentif (upaya pelaksana program)
- 4) Struktur birokrasi dengan indikator mekanisme kerja (SOP) dan penyebaran tanggung jawab (fragmentasi). (Rahmatillah, 2023:8.3)

Berdasarkan penjelasan model-model implementasi diatas, peneliti memilih untuk menggunakan teori implementasi menurut Edward III dikarenakan teori Edward III terdapat empat variabel yang relevan dengan permasalahan yang ada di objek wisata Situ Bagendit yaitu terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, serta teori Edward juga memiliki kelebihan yang dimana dapat menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi fenomena yang tidak rumit dibanding dengan teori implementasi yang lain.

2.2 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Dalam Penanggulangan Tuberkulosis Paru

Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 (33 pasal) tentang penanggulangan tuberkulosis yang bertujuan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan lainnya dalam melaksanakan penanggulangan TB. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya;

2. Bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
3. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanggulangan Tuberkulosis sudah tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur kembali ketentuan peraturan perundang-undangan guna penanggulangan Tuberkulosis;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 ditetapkan dengan ketentuan umum pada pasal 1 yaitu:

1. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
2. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan
3. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.

4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Yohanes Fritantus dan Nunuk Rukminingsi	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Kota Surabaya (Kajian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013, Studi Kasus Di Puskesmas Putat Jaya, Kota Surabaya)	Pendekatan Deskripti Kualitatif	Dengan Peningkatan jumlah temuan kasus HIV dan AIDS di Kota Surabaya, maka pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Surabaya dinilai belum dilaksanakan secara maksimal. Faktor yang paling mempengaruhi tidak maksimalnya penanggulangan HIV dan AIDS ini adalah 182 komunikasi antarinstansi yang terkait dalam Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surabaya.
2	Karina Gladis Panggabean, Novi Winarti	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Kepulauan Riau	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	i semua program dan layanan yang diatur dalam kebijakan ini sudah sesuai dengan SOP dan pengimplementasian kebijakan juga sudah berjalan dengan baik, kebijakan ini lahir dari kebutuhan masyarakat, yang dimana apabila sudah terbentuk kebijakan maka harus dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sekalipun susah. Hanya saja kedepannya dibutuhkan promosi mengenai bahaya Tuberkulosis yang lebih menggebu-gebu

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				dan peran aktif dari setiap pemerintah daerah dalam mendukung dan menjalankan kebijakan penanggulangan Tuberkulosis ini. Selain peran dari pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya, masyarakat juga harus turut serta berperan aktif dalam penanggulangan penyakit ini seperti yang tercantum dalam Perpres
3	Elfida Purba, Wisnu Hidayat, Evawani M. Silitonga	Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Tb Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Penderita Tb Paru Di Puskesmas Tigabaru Kabupaten Dairi Tahun 2018	Kualitatif	Penguatan Kepemimpinan Program TB: Penguatan kepemimpinan dalam program penanggulangan TB di Kabupaten Dairi telah berjalan dengan baik. Target penanggulangan TB ditetapkan berdasarkan target nasional, dan setiap Puskesmas berperan aktif dalam pelaksanaan program ini . Peningkatan Akses Layanan: Terdapat peningkatan akses terhadap layanan TB yang berkualitas, termasuk penggunaan Test Cepat Molekuler (TCM) yang mempercepat diagnosis

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				dan pengobatan TB. Namun, masih ada tantangan dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Masyarakat. <i>Surveilans TB</i> : Penelitian menunjukkan bahwa belum ada sistem surveilans TB yang efektif di setiap Puskesmas di Kabupaten Dairi. Surveilans yang ada hanya terbatas pada pemantauan kasus kejadian luar biasa, yang menghambat pemantauan perkembangan TB secara menyeluruh.
4	Arif Prianto	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular Oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya	Metode yang digunakan termasuk ke dalam penelitian kualitatif,	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum terkendalinya penyakit menular di Kota Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mendalami dan mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dalam pengendalian penyakit menular di Kota Tasikmalaya.
5	Ellisha Putriady	Implementasi Kebijakan Pemerintah Permenkes No 67	Metode penelitian kualitatif.	Jika melihat data Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan 2006-2021,

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Tahun 2016 Dalam Penanggulangan Tuberkulosis Di Kota Medan		jumlah temuan baru kasus TB di Kota Medan pada tahun 2015 mencapai 2.872 atau mengalami penurunan hampir 94% dari temuan kasus baru pada tahun 2015. 2014, yaitu 3.047. Pemerintah dengan adanya sinergi antara Menteri Kesehatan membentuk suatu langkah yang tepat dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis sebagai upaya untuk merealisasikan masyarakat yang lebih sehat. Kota Medan untuk penanggulangan kasus Tuberkulosis mengacu kepada program nasional, yang mana mempunyai target untuk eliminasi TB tahun 2030 dan Indonesia bebas TB tahun 2050.
6	Mega Sasmita, Asnia Zainuddin, Nani Yuniar	Implementasi Program Penanggulangan TB Paru di Puskesmas Besulutu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe	Metode pendekatan kualitatif deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program TB paru di Puskesmas Besulutu menggunakan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) sebagai pendekatan utama.

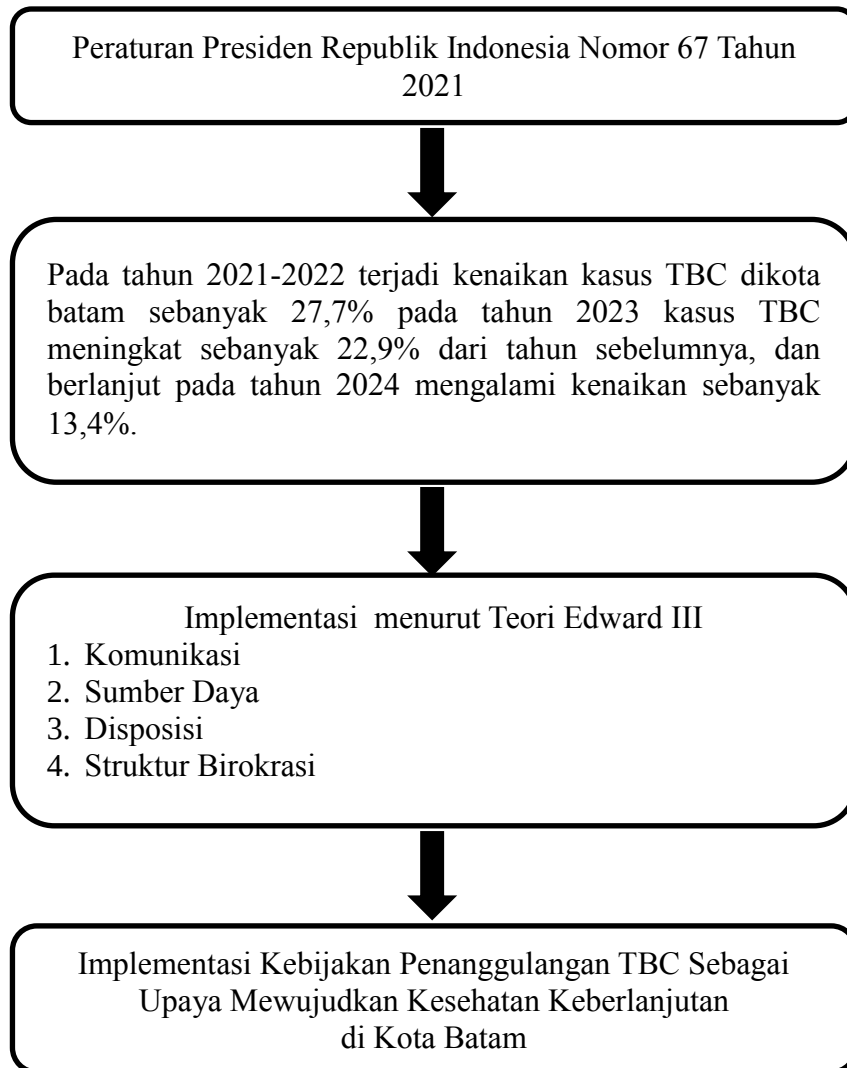
Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena lebih mengandalkan pendekatan pasif, yaitu menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan, bukan melalui pelacakan aktif. Angka kesembuhan pasien TB di wilayah ini masih tergolong rendah, yaitu sekitar 65%, jauh di bawah target nasional sebesar 85%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan tenaga medis, rendahnya kepatuhan pasien terhadap pengobatan, dan masih kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya skrining dini dan pengobatan TB.
7	Maisarah Mitra Adrian, Eko Priyo Purnomo dan Agusriyara	Implementasi Kebijakan Pemerintah Permenkes No 67 Tahun 2016 Dalam Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta	Metode penelitian pendekatan kualitatif	Berdasarkan hasil yang diteliti, peneliti menyimpulkan bahwa secara keseluruhan pengimplementasian kebijakan penanggulangan TB di Kota Yogyakarta berjalan cukup baik, namun angka kesembuhan penderita TB di Kota Yogyakarta masih di bawah target nasional.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				Dan penelitian menyarankan perlunya komitmen dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi TB di Kota Yogyakarta

2.4 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir